

REDEFINING MOTHERHOOD IN EARLY 20TH-CENTURY BUMIPUTERA WOMEN'S PRESS

Redefinisi Keibuan Dalam Pers Perempuan Bumiputera Awal Abad Ke-20

Zellica Vanudia Amundari

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

zelyciaamundari@gmail.com

(*) Corresponding Author
zelyciaamundari@gmail.com

How to Cite: Zellica Vanudia Amundari. (2025). Redefining Motherhood In Early 20th-Century Bumiputera Women's Press. doi: 10.36526/js.v3i2.5844

Received: 19-07-2025
Revised: 21-09-2025
Accepted: 24-10-2025

Keywords:

Motherhood,
Women's Press,
Bumiputera Women,
Dutch East Indies.

Abstract

In the early 20th century, the rise of the Bumiputera women's press in the Dutch East Indies marked a significant turning point in the negotiation of women's roles and identities under colonial rule. Despite its historical importance, the role of print media in shaping gender discourses among indigenous women remains understudied. This article addresses that gap by analyzing how the concept of motherhood was constructed, negotiated, and redefined in *Soenting Melajoe* and *Poetri Hindia*—two pioneering publications managed by and for Bumiputera women. Grounded in cultural history and employing discourse analysis as its main method, this study examines the representation of motherhood within the intersecting frameworks of colonialism, early nationalism, and emerging ideas of modernity. The findings reveal a marked transformation in the image of the mother: from a domestic caretaker confined to the household to a moral agent, educator, and symbol of collective female awakening. This redefinition was shaped by the influences of the colonial Ethical Policy, discourses of female emancipation, and the increasing presence of educated women in public life. The study concludes that motherhood in the Bumiputera women's press functioned not as a fixed ideal, but as a dynamic and contested category—through which women actively participated in the rearticulation of identity, nationhood, and gender roles within the colonial society.

PENDAHULUAN

Awal abad ke-20 di Hindia Belanda ditandai oleh perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Bumiputera, seiring munculnya pendidikan Barat dan gagasan emansipasi. Dalam konteks ini, media cetak menjadi instrumen penting bagi artikulasi wacana modernitas, termasuk oleh dan untuk perempuan. Kehadiran media perempuan, yang dikelola dan ditulis oleh perempuan Bumiputera, memberikan ruang baru bagi perempuan untuk terlibat dalam produksi pengetahuan, perdebatan publik, dan pembentukan identitas kolektif (Wieringa, 1995; Blackburn, 2004).

Salah satu media pertama yang memperlihatkan dinamika tersebut adalah *Soenting Melajoe*, didirikan tahun 1912 di Padang oleh Roehana Koeddoes, seorang tokoh penting dalam sejarah jurnalisme dan pendidikan perempuan Indonesia (Blackburn, 2008). Surat kabar ini diterbitkan dalam bahasa Melayu dan ditujukan kepada pembaca perempuan, membahas isu-isu seperti pendidikan, moralitas, adat, dan hak-hak perempuan. Inisiatif ini lahir dari konteks Minangkabau yang unik, di mana sistem matrilineal dan pendidikan Islam modern bertemu dengan ide-ide kolonial tentang kemajuan (Locher-Scholten, 2000).

Berbeda dengan media arus utama kolonial yang umumnya dikendalikan oleh laki-laki Eropa atau elite priyayi, *Soenting Melajoe* menjadi ruang otonom yang memungkinkan perempuan menyampaikan pandangan mereka atas persoalan sosial, termasuk kritik terhadap adat patriarkal, poligami, dan keterbatasan pendidikan bagi perempuan (Wieringa, 1995). Pers berperan penting dalam membentuk pemahaman baru tentang perempuan sebagai subjek aktif dalam masyarakat

kolonial. Surat kabar-surat kabar ini tidak hanya menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan, tetapi juga menggugat peran tradisional yang selama ini dilekatkan pada figur ibu. Keibuan dalam narasi pers perempuan tidak lagi hanya dilihat sebagai kodrat biologis atau fungsi domestik, melainkan sebagai peran sosial dan kultural yang dapat diberdayakan untuk mendukung kemajuan bangsa. Representasi keibuan dalam media ini mengandung nilai-nilai ideologis yang merefleksikan ketegangan antara modernitas kolonial, norma adat, dan semangat emansipasi.

Dalam konteks kolonialisme, negara kolonial memandang ibu sebagai medium strategis dalam membentuk keluarga Bumiputera yang “beradab,” sehat, dan taat kepada norma moral kolonial. Namun, dalam wacana yang berkembang di kalangan perempuan terpelajar Bumiputera, figur ibu ditampilkan sebagai pendidik utama anak-anak bangsa, penjaga moralitas, dan pelaku perubahan sosial. Dengan kata lain, ibu dalam wacana perempuan Bumiputera dimaknai sebagai agen modernitas yang terlibat dalam proyek kemajuan. Narasi ini menunjukkan bahwa keibuan tidak bersifat universal atau ahistoris, melainkan dibentuk melalui proses sosial, politik, dan budaya yang kompleks.

Studi tentang keibuan sebagai konstruksi sosial telah lama menjadi perhatian dalam kajian feminis. Karya-karya seperti *“Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution”* oleh Adrienne Rich (2021) dan *“Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace”* oleh Sara Ruddick (1990) menegaskan bahwa keibuan adalah praktik yang bersifat politis dan ideologis. Dalam konteks kolonial, Ann Laura Stoler menunjukkan bagaimana proyek kolonial turut membentuk dan mengatur praktik keibuan demi kepentingan reproduksi kekuasaan. Di Indonesia sendiri, kajian Julia Suryakusuma (2011) dalam *“Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru”* menjadi salah satu kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana rezim Orde Baru mengonstruksi figur ibu sebagai instrumen negara melalui peran domestik dan moral. Meskipun fokusnya pada periode pascakolonial, konsep “ibuisme negara” relevan untuk melihat bagaimana keibuan juga pernah dimobilisasi secara ideologis dalam masa kolonial, meskipun dengan logika dan kepentingan yang berbeda.

Lebih lanjut, dalam dua dekade terakhir, kajian mengenai sejarah perempuan di Hindia Belanda telah mengalami perkembangan signifikan. Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada figur-figur emansipatoris seperti Raden Ajeng Kartini atau Rasuna Said, dan pada isu pendidikan sebagai wahana utama proyek modernitas kolonial. Schulte Nordholt (2011), misalnya, melalui tulisannya dalam *Journal of Southeast Asian Studies* menyoroti bagaimana struktur kolonial memproduksi subjek-subjek modern melalui pendidikan dan birokrasi, tetapi tidak menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam proses ini. Sementara itu, Andaya (2006) menawarkan kerangka historis tentang peran perempuan di Asia Tenggara awal modern, namun tidak secara spesifik menyoroti negosiasi identitas perempuan dalam konteks Hindia Belanda abad ke-20.

Studi yang menelaah media perempuan, khususnya surat kabar seperti *Soenting Melajoe*, sebagai ruang artikulasi identitas perempuan Bumiputera juga masih terbatas. Media ini kerap dibahas dalam kerangka sejarah pers atau sebagai bagian dari narasi besar gerakan perempuan awal, namun belum banyak yang membedahnya sebagai ruang diskursif di mana gagasan-gagasan tentang keibuan, peran domestik, dan identitas perempuan dinegosiasikan. Sears (1996) menunjukkan bagaimana konstruksi feminin dalam wacana negara membentuk relasi kuasa antara negara, perempuan, dan seksualitas. Namun pembahasan tersebut lebih banyak tertuju pada periode pascakolonial dan belum menyentuh secara mendalam peran media perempuan di masa kolonial.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep keibuan dikonstruksi dan didefinisi dalam media perempuan Bumiputera awal abad ke-20. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana figur “ibu” direpresentasikan dan dinegosiasikan dalam wacana yang berkembang di surat kabar perempuan seperti *Soenting Melajoe* dan *Poetri Hindia*, serta bagaimana representasi tersebut merefleksikan ketegangan dan interaksi antara norma tradisional, struktur kolonial, dan semangat modernitas?

Dengan menelaah peran media sebagai arena produksi wacana, studi ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa keibuan bukanlah konsep yang statis, melainkan medan negosiasi sosial-politik yang mencerminkan dinamika perubahan identitas perempuan dalam masyarakat kolonial.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, berfokus pada analisis sumber-sumber primer dari awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Sumber utama berasal dari surat kabar dan majalah yang memuat suara, pemikiran, dan representasi perempuan Bumiputera mengenai isu keibuan, pendidikan, moralitas, dan peran sosial mereka dalam masyarakat kolonial. Surat kabar *Soenting Melajoe* menjadi objek utama kajian, khususnya edisi 27 Juni 1913 yang menampilkan cerita naratif “Nasimah, Belandja,” serta edisi 5 Desember 1919 yang memuat artikel opini pendidikan oleh A. Karim berjudul “Bagaimanakah Anak2 Boemi Poetri Haroes Dididik.” Kedua teks tersebut dipilih karena memperlihatkan artikulasi eksplisit tentang tanggung jawab keibuan dan pendidikan dalam bingkai modernitas dan adat Minangkabau.

Selain *Soenting Melajoe*, penelitian ini juga mengacu pada artikel-artikel yang berasal dari surat kabar dan majalah berbahasa Belanda seperti *De Locomotief*, *Bataviasch Nieuwsblad*, *Het Koloniaal Weekblad*, dan *Het Katholieke Schoolblad*, yang memuat liputan tentang organisasi perempuan Bumiputera, pidato-pidato publik, pandangan masyarakat Inlander, serta opini mengenai pendidikan dan posisi perempuan. Di antaranya adalah laporan pertemuan Boedi Oetomo (1918), pidato Mevrouw Datoe Toemenggoeng tentang posisi perempuan Bumiputera (1931), artikel tentang organisasi perempuan (1914), serta rubrik-rubrik yang mencerminkan respons publik terhadap praktik sosial dan kesehatan. Artikel-artikel ini mewakili jenis teks seperti esai naratif, opini, liputan kegiatan, dan refleksi sosial yang menunjukkan keterlibatan perempuan atau diskursus tentang perempuan dalam ranah publik kolonial.

Seluruh sumber primer diperoleh melalui akses digital terhadap arsip surat kabar dan dokumen resmi, termasuk koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, KITLV Leiden, dan basis data Delpher.nl. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis menggunakan tahapan metodologis sejarah yang mencakup heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (penilaian otentisitas dan konteks), interpretasi (pembacaan isi dalam kerangka historis), dan historiografi (penyusunan narasi berbasis analisis kritis). Selain itu, digunakan pula dokumen resmi seperti *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* (1910) dan laporan-laporan parlemen Hindia Belanda (*Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal* tahun 1902–1915) sebagai latar kebijakan kolonial yang mempengaruhi diskursus perempuan.

Untuk menganalisis isi teks, pendekatan analisis wacana sejarah digunakan guna mengidentifikasi bagaimana figur “ibu” direpresentasikan, dikategorikan, dan diperdebatkan. Proses analisis dilakukan melalui pengamatan terhadap struktur narasi dan pemaknaan simbolik yang muncul dalam artikel-artikel tersebut, terutama dalam hal dikotomi antara keibuan tradisional dan keibuan modern, atau antara domestik dan sosial. Dengan memerhatikan relasi antara bahasa, kekuasaan, dan identitas, pendekatan ini memungkinkan pembacaan bahwa keibuan dalam media perempuan tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga produktif—membentuk imajinasi sosial dan posisi perempuan dalam proyek modernitas kolonial.

Sumber-sumber sekunder, seperti buku sejarah, artikel ilmiah, dan kajian feminis, digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual dan mendukung interpretasi terhadap dinamika sosial yang memengaruhi representasi keibuan. Dengan menempatkan surat kabar perempuan sebagai situs wacana, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa keibuan merupakan medan negosiasi ideologis, tempat perempuan Bumiputera mereformulasi peran mereka dalam masyarakat kolonial yang sedang mengalami transformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya Perempuan Bumiputera Terdidik

Kemunculan perempuan terdidik di Hindia Belanda menandai perubahan penting dalam struktur sosial kolonial sekaligus menjadi katalis bagi redefinisi keibuan yang sebelumnya dikonstruksi secara kaku oleh norma patriarkal dan kolonial. Akses terhadap pendidikan memungkinkan perempuan mengeksplorasi wacana baru tentang hak, peran, dan identitas, sehingga tugas keibuan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai fungsi biologis atau domestik, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan politik. Dalam konteks ini, pelaksanaan Politik Etis pada awal abad ke-20 menjadi titik tolak penting. Kebijakan ini, dengan slogan “irigasi, emigrasi, dan edukasi,” diusung sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah masa eksploitasi sistem tanam paksa. Namun, pada kenyataannya, proyek-proyek tersebut tidak sepenuhnya diarahkan untuk pemerataan akses, termasuk di bidang pendidikan, melainkan tetap mengukuhkan ketimpangan struktural.

Dalam kerangka kolonial, pendidikan diposisikan sebagai instrumen modernisasi, tetapi dimaknai sebagai alat domestikasi dan pengendalian sosial. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak ditujukan untuk membebaskan subjek kolonial, melainkan untuk mereproduksi hierarki sosial. Perempuan menjadi kelompok yang mengalami dampak paling kompleks, karena mereka menghadapi batasan berlapis: sebagai Bumiputera dan sebagai perempuan. Dalam sistem ini, mereka menjadi target dari kebijakan pendidikan yang selektif dan tidak setara.

Gagasan “hutang budi” dari C. Th. van Deventer dan para pendukung Politik Etis mendorong pembangunan sekolah-sekolah Bumiputera, termasuk bagi anak perempuan (Van Deventer, 1899). Namun, implementasinya jauh dari ambisi awal. Usulan Menteri Fock untuk mendirikan 700 sekolah rakyat pada 1906 hanya menghasilkan lima sekolah pada 1907, 75 sekolah pada 1908, dan 77 sekolah pada 1909 (Van Deventer, 1912). Ini mencerminkan keterbatasan anggaran dan kurangnya kemauan politik kolonial untuk menciptakan transformasi pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan tetap bersifat eksklusif dan berfungsi sebagai penanda legitimasi kekuasaan kolonial.

Perempuan Bumiputera mengalami keterpinggiran dalam sistem ini. Sekolah-sekolah yang menerima murid perempuan umumnya hanya menjangkau kalangan elite. Normaalschool dan Meisjes Normaalschool (MNS) yang beroperasi di kota-kota besar seperti Batavia, Bukittinggi, atau Surakarta lebih selektif secara sosial dan ekonomi. Data Tweede Kamer der Staten-Generaal memperlihatkan bahwa sebagian besar siswi berasal dari keluarga pegawai negeri, guru, bangsawan, atau pedagang kaya. Tahun 1901, sekolah asrama di Tomohon mencatat 67 siswi, seluruhnya dari keluarga elite (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1902). Dua tahun kemudian, normaalschool di Batavia mencatat 28 peserta perempuan, seluruhnya dari kalangan elite (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1903). Pada 1906, normaalschool yang sama menerima 135 peserta, 128 di antaranya adalah perempuan (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1906), yang dilatih untuk menjadi guru dasar. Meski angka ini tampak menjanjikan, fokus pendidikannya tetap terbatas pada pelatihan domestik dan sosial.

Sekolah-sekolah asrama lain seperti yang di Tomohon pun tetap menjadi ruang eksklusif. Tahun 1910 mencatatkan 105 siswa, 98 di antaranya perempuan dari latar elite (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1911). Tahun 1914 jumlahnya meningkat menjadi 116 siswa perempuan dengan latar serupa (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1915). Kurikulum yang diajarkan tetap menekankan keterampilan domestik seperti menjahit, menyulam, dan pelatihan guru dasar, tanpa membuka akses ke bidang ilmu non-domestik atau jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tersebut lebih berfungsi untuk melanggengkan struktur sosial kolonial ketimbang memberdayakan perempuan secara menyeluruh.

Pendidikan perempuan diarahkan secara ideologis. Fungsi domestik menjadi tujuan utama, ditanamkan melalui kurikulum yang mengajarkan keterampilan rumah tangga, moralitas, dan pengasuhan anak. Bahkan sekolah bidan (*vroedvrouwenschool*) hanya memberikan pelatihan medis dasar. Akses ke pendidikan kedokteran lanjutan seperti STOVIA ditutup bagi perempuan hingga 1912 ("Tiende Bondsvergadering van Boedi Oetomo," *De Locomotief*, 4 Juli 1918). Ketika Marie Thomas diterima di STOVIA dan menjadi dokter perempuan pertama Hindia Belanda, hal tersebut merupakan pengecualian, bukan perubahan sistemik.

Sistem pendidikan kolonial juga diklasifikasikan secara rasial. Sekolah seperti *Europeesche Lagere School* (ELS) ditujukan bagi anak-anak Eropa, *Hollandsch-Chineesche School* (HCS) bagi Tionghoa kaya, sedangkan perempuan Bumiputera hanya dapat mengakses *volksschool* yang memiliki fasilitas dan kurikulum terbatas. Statistik tahun 1916 menunjukkan hanya 16% dari siswa HIS adalah perempuan, dan sebagian besar berasal dari kelas elite. Biaya sekolah yang mencapai 36 gulden per tahun menjadi hambatan besar bagi keluarga Bumiputera miskin.

Distribusi geografis pendidikan juga timpang. Sekolah perempuan lebih banyak dibangun di kota besar, sementara desa tetap terisolasi. Meski begitu, sistem kolonial menyisakan ruang resistensi. Perempuan yang berhasil masuk ke sistem pendidikan kolonial mulai menggunakan keterampilan baca-tulis dan wacana publik untuk mengekspresikan identitas baru sebagai perempuan modern. Pendirian Taman Poestaka pada 1910 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1910 no. 5) dan Balai Poestaka pada 1917 (Swantoro, 2016) menjadi bagian dari kebijakan literasi kolonial yang dimaksudkan sebagai instrumen kontrol, namun secara paradoks juga memberi ruang terbatas bagi artikulasi pengetahuan baru.

Modernitas di Hindia Belanda tidak sekadar representasi nilai-nilai Barat, tetapi medan negosiasi antara kekuasaan kolonial dan masyarakat lokal. Dalam medan ini, perempuan terdidik menjadi agen modernitas yang aktif membentuk ulang struktur sosial, identitas, dan pengetahuan. Walau mula-mula dimasukkan dalam sistem pendidikan kolonial untuk dijinakkan, sebagian perempuan justru menegosiasikan ruang-ruang tersebut untuk membentuk agensi intelektual dan sosial yang kritis.

Pendidikan membuka kemungkinan baru: keterampilan literasi, perluasan jaringan, dan akses terhadap wacana kemajuan. Tokoh seperti Kartini, Dewi Sartika, dan Roehana Koeddoes memperlihatkan bagaimana literasi dan kesadaran sosial melahirkan narasi tandingan. Kartini, walau tidak mengenyam pendidikan tinggi, menulis secara sistematis tentang ketidakadilan gender dan keterbatasan pendidikan dalam surat-surat kepada Abendanon. Pernyataannya, "Kami tidak hidup, kami hanya menunggu mati," mencerminkan stagnasi perempuan dalam tatanan patriarkal. Surat-surat ini kemudian diterbitkan dalam *Door Duisternis tot Licht* (1911). Dewi Sartika mendirikan Sekolah Istri di Bandung tahun 1904, mengajarkan baca-tulis dan keterampilan praktis. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan munculnya kesadaran baru tentang perempuan. Roehana Koeddoes, redaktur perempuan pertama di Hindia Belanda, menerbitkan *Soenting Melajoe* sejak 1912, yang menjadi wadah bagi perempuan Minangkabau menyuarakan pendapat tentang adat, pendidikan, dan hak perempuan (Darwis, 2013).

Agensi perempuan terdidik juga meluas di luar tokoh besar. Mereka mendirikan sekolah, menjadi guru, dan aktif dalam organisasi seperti Putri Mardika yang didirikan di Batavia tahun 1912 (Wiroloekito, 1914). Melalui aktivitas ini, mereka membangun jaringan kolektif yang memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat kolonial. Namun, penting dicatat bahwa agensi ini bersifat tidak merata. Banyak perempuan tetap tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan media, terhambat oleh buta huruf, mobilitas terbatas, serta tekanan adat dan agama konservatif. Agensi perempuan terdidik harus dilihat sebagai proses bertahap dan dinamis. Mereka bukan sekadar produk kolonialisme, tetapi aktor penting dalam pembentukan modernitas lokal. Melalui refleksi, resistensi, dan reinterpretasi, perempuan terdidik membentuk identitas sebagai perempuan modern yang kritis terhadap struktur sosial kolonial. Mereka tidak hanya simbol kemajuan, tetapi juga motor aktif dari proses modernisasi Hindia Belanda.

Tabel berikut merangkum pergeseran makna keibuan dari model tradisional menuju model modern sebagaimana tercermin dalam wacana media perempuan Bumiputera:

Tabel 1. Transformasi Keibuan dalam Wacana Perempuan Bumiputera Awal Abad ke-20

Dimensi	Keibuan Tradisional	Keibuan Modern	Implikasi
Peran Sosial	Penjaga rumah tangga; pengasuh anak; subordinat dari suami	Agen pendidikan; pelindung kesehatan keluarga; pengelola rumah tangga rasional	Legitimasi agensi perempuan dalam ruang domestik dan sosial
Relasi Gender	Tunduk pada struktur patriarkal adat dan kolonial	Relasi reflektif berbasis pengetahuan dan tanggung jawab moral	Tantangan terhadap dominasi laki-laki dan struktur adat
Artikulasi dalam Media	Tidak hadir atau direpresentasikan oleh pihak lain	Menulis di media perempuan; menyuarakan kritik dan tuntutan sosial	Pembentukan wacana alternatif yang membentuk kesadaran kolektif
Institusionalisasi	Berbasis adat atau agama; peran turun-temurun	Diperkuat oleh pendidikan, organisasi perempuan, dan modernisasi	Basis kultural bagi gerakan perempuan

Transformasi ini juga tidak terbatas pada dimensi pendidikan semata, melainkan meluas ke aspek-aspek lain dalam kehidupan modern, termasuk gaya hidup, kesehatan, dan pengelolaan rumah tangga. Dalam wacana yang dibangun oleh media perempuan Bumiputera, keibuan mulai diasosiasikan dengan efisiensi, rasionalitas, dan kesadaran akan pentingnya kebersihan serta gizi keluarga. Ibu tidak lagi diposisikan sebagai penjaga tradisi yang pasif, tetapi sebagai manajer rumah tangga modern yang terampil dan visioner. Pergeseran ini menunjukkan bahwa redefinisi keibuan tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga praktis, menyentuh kehidupan sehari-hari perempuan dan membentuk identitas sosial mereka sebagai agen modernitas dalam ranah domestik.

Keibuan Sebagai Agen Pendidikan

Secara umum, masyarakat membentuk stereotip gender melalui nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun, terutama dalam sistem patriarki. Sistem ini memposisikan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk dan melayani laki-laki. Sejak dini, anak-anak diajarkan untuk bertindak sesuai peran gender yang telah ditentukan secara kultural—laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan sebagai penjaga rumah tangga (Latifa dan Pribadi, 2022). Konstruksi semacam ini mengakar kuat sejak masa Hindia Belanda, ketika ide tentang perempuan disusun dalam kerangka kolonial dan patriarkal yang saling memperkuat. Pada masa tersebut, perempuan dikonstruksikan dalam wacana keibuan (*moederschap*) yang menekankan peran mereka dalam ruang domestik: mendidik anak, melayani suami, dan menjaga rumah tangga.

Namun, pada awal abad ke-20, redefinisi terhadap peran ini mulai muncul, seiring hadirnya golongan perempuan Bumiputera terdidik. Media perempuan seperti *Soenting Melajoe* menampilkan gagasan keibuan yang lebih kompleks: bukan sekadar peran domestik, melainkan fungsi intelektual, moral, bahkan politis. Dalam kerangka ini, keibuan menjadi sarana pendidikan karakter bangsa. Seperti ditulis dalam *Soenting Melajoe* edisi 5 Desember 1919 No. 48, dalam artikel berjudul “Bagaimanakah Anak2 Boemi Poetra Harus Dididik?” (Karim, 1919), ibu diposisikan sebagai pendidik utama anak yang harus membentuk karakter nasional: kerja keras, kejujuran, sopan santun, dan keberanian.

Lebih jauh, keibuan juga dikaitkan dengan praktik pengasuhan yang berbeda dari model yang berkembang dalam masyarakat kolonial Eropa. Dalam masyarakat Belanda di Hindia Belanda, misalnya, praktik menyerahkan pengasuhan anak kepada pengasuh dari kalangan Bumiputera

merupakan hal yang lazim, terutama di kalangan elite perkotaan. Iklan-iklan yang menawarkan jasa pengasuhan sering muncul dalam surat kabar kolonial, menunjukkan bahwa ibu-ibu Eropa tidak selalu hadir secara langsung dalam pengasuhan anak mereka.



Gambar 1. Iklan lowongan pekerjaan untuk pengasuh
Sumber: *Bataviaasch Nieuwsblad* edisi 21 Oktober 1911

Pola ini menggambarkan struktur relasi kelas dan ras yang tajam, di mana perempuan Bumiputera berperan sebagai pekerja domestik bagi keluarga Eropa, tetapi tidak memiliki otoritas atas nilai-nilai pendidikan yang diajarkan. Sebaliknya, dalam narasi yang berkembang di kalangan perempuan Bumiputera, pengasuhan dipandang sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang tidak bisa dialihkan begitu saja. Wacana yang dimunculkan menolak ketergantungan pada sistem pengasuhan kolonial dan menekankan perlunya keterlibatan langsung ibu dalam membentuk karakter anak.

Model asuh kolektif seperti yang dikenal dalam sistem matrilineal Minangkabau (Valentina, 2018), di mana peran mamak sangat dominan dalam pendidikan anak, juga mulai dipertanyakan. Dalam struktur keluarga tradisional, tanggung jawab pengasuhan tidak hanya dibebankan kepada ayah dan ibu, tetapi juga kepada kerabat dalam garis ibu. Namun, melalui refleksi kritis dalam media perempuan, muncul dorongan untuk menegaskan kembali kehadiran ibu sebagai figur sentral yang berperan aktif dalam perkembangan anak, baik secara emosional, moral, maupun intelektual. Redefinisi keibuan ini sejalan dengan apa yang disebut Adrienne Rich sebagai *reclamation of motherhood*—yakni bagaimana perempuan mengambil alih makna keibuan dari bentuk yang dilegitimasi patriarki dan negara, menjadi bentuk pengalaman yang memberdayakan (Rich, 1976). Dalam konteks Hindia Belanda, perempuan terdidik mulai menolak definisi keibuan yang dikonstruksikan kolonialisme dan budaya patriarkal lokal. Mereka menyadari bahwa peran ibu bukan sekadar reproduksi biologis atau fungsi sosial yang tunduk pada laki-laki, tetapi juga aktor dalam produksi wacana, moralitas, dan pendidikan bangsa.

Transformasi keibuan ini tidak bersifat statis, melainkan merupakan hasil dari proses negosiasi historis antara nilai-nilai tradisional, intervensi kolonial, dan aspirasi modernitas. Secara ringkas, pergeseran makna keibuan dari tradisional ke modern dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Transformasi Keibuan dari Tradisional ke Modern dalam Konteks Pendidikan

Aspek	Keibuan Tradisional	Keibuan Modern	Implikasi
Fungsi Utama	Reproduksi dan pengasuhan	Pendidikan moral, advokasi sosial	Perempuan dilihat sebagai aktor pembangunan generasi dan transformasi sosial
Ruang Peran	Domestik dan privat	Publik, intelektual, dan politis	Ibu mulai memasuki ruang publik dan menegosiasikan otoritas moral di luar rumah
Representasi Budaya	Simbol kehormatan keluarga	Agen rasional, pendidik generasi, pelaku perubahan	Keibuan menjadi basis legitimasi bagi partisipasi sosial dan politik perempuan

Hubungan dengan Negara	Tidak terhubung langsung	Diarahkan oleh proyek etis kolonial dan nasional	Perempuan menjadi target maupun pelaksana dari proyek modernisasi bangsa
Produksi Pengetahuan	Lisan, adat, praktik sehari-hari	Tulisan, sekolah, media massa	Perempuan berpartisipasi dalam penciptaan wacana dan konstruksi ideologis baru
Nilai yang Diutamakan	Kesabaran, kepatuhan, keharmonisan adat	Pengetahuan, moralitas, kesadaran sosial	Penekanan pada rasionalitas, etika sosial, dan otonomi intelektual perempuan

Penting untuk membaca proses ini secara kritis. Seperti ditunjukkan oleh Stoler (2002), kolonialisme bukan hanya menaklukkan wilayah, melainkan juga mengatur emosi, moralitas, dan relasi gender. Perempuan, dalam sistem ini, tidak hanya dikontrol secara politik, tapi juga dijadikan simbol kemurnian moral keluarga kolonial. Ketika perempuan Bumiputera menyuarakan model keibuan yang baru, mereka tidak sepenuhnya keluar dari kerangka yang telah diatur kekuasaan kolonial. Bahkan, redefinisi keibuan sebagai “ibu pendidik bangsa” tetap dibentuk dalam konteks proyek etis dan moral kolonial. Di titik ini, seperti dicatat Suryakusuma (2011) dalam gagasannya tentang *State Ibuism*, negara (baik kolonial maupun nasional) kerap mengatur perempuan melalui glorifikasi peran keibuan—mewajibkan perempuan mendidik anak dan melayani negara lewat keluarga, bukan sebagai individu bebas.

Redefinisi keibuan dalam media perempuan Bumiputera pada masa kolonial memang tampak progresif. Namun, secara sosial, ia tetap bersifat elitis. Akses terhadap pendidikan—yang menjadi prasyarat munculnya kesadaran kritis—hanya tersedia bagi perempuan dari kelas menengah ke atas, seperti anak bangsawan, guru, atau pegawai. Sebagian besar perempuan Bumiputera tetap buta huruf dan tidak memiliki akses ke surat kabar atau sekolah (lihat Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1903, 1906, 1911). Dengan demikian, gagasan “ibu sebagai pendidik bangsa” menjadi privilese intelektual kelas elite, bukan representasi kolektif seluruh perempuan Bumiputera. Hal ini menimbulkan dilema: apakah wacana emansipatoris yang berkembang benar-benar memberdayakan semua perempuan, ataukah hanya segelintir perempuan yang telah melewati ambang modernitas kolonial? Dalam kerangka ini, redefinisi keibuan menjadi proyek ideologis ganda: di satu sisi membebaskan, di sisi lain tetap terjebak dalam kerangka kelas dan struktur kolonial.

Meskipun eksklusif, redefinisi ini tetap memiliki dampak historis penting. Ia menjadi batu loncatan bagi terbentuknya kesadaran kolektif di kalangan perempuan terdidik bahwa keibuan bukan sekadar peran privat, tetapi juga peran politis. Tokoh-tokoh seperti Dewi Sartika, Roehana Koeddoes, dan Kartini menyuarakan pentingnya perempuan terlibat dalam pendidikan, media, dan organisasi sosial. Inilah yang kemudian menginspirasi berdirinya organisasi-organisasi perempuan awal seperti *Putri Mardika* (1912) dan *Poetri Hindia* (1913), yang memperjuangkan hak perempuan atas pendidikan, pernikahan yang adil, dan partisipasi dalam kehidupan publik.

Dengan menjadikan keibuan sebagai panggilan moral-politik, perempuan Bumiputera terdidik berhasil membangun wacana alternatif yang menantang posisi subordinat mereka dalam sistem kolonial dan patriarki lokal. Perubahan ini membuka jalan bagi lahirnya gerakan perempuan nasional pada 1920-an hingga Kongres Perempuan pertama tahun 1928. Dalam konteks inilah, redefinisi keibuan harus dilihat tidak hanya sebagai pergeseran peran, tetapi sebagai *proyek kesadaran sejarah* yang berakar dari pengalaman, literasi, dan pembentukan solidaritas.

Keibuan dan Gaya Hidup Modern

Dalam media cetak yang ditujukan bagi perempuan Bumiputera pada awal abad ke-20, keibuan tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab domestik semata, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi gaya hidup yang berlandaskan nilai-nilai modernitas. Perempuan mulai memaknai dirinya sebagai sosok modern yang aktif mengatur kehidupan rumah tangga dengan cara-cara yang

rasional, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Gaya hidup modern di sini mencakup pengelolaan tubuh, konsumsi, kesehatan, serta keterlibatan ibu dalam aktivitas ekonomi produktif dan strategis.

Narasi-narasi ini menampilkan perempuan bukan hanya sebagai penjaga moral rumah tangga, tetapi juga sebagai *manajer rumah tangga modern* yang sadar akan pentingnya pola hidup sehat, efisiensi ekonomi, dan keterampilan praktis. Dalam kerangka ini, keibuan tidak lagi sekadar naluriah atau “alami”, melainkan menjadi proyek sadar yang dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, dan pertimbangan rasional. Pandangan ini beririsan dengan gagasan Rich (1976) tentang “*motherhood as institution vs. motherhood as experience*”, di mana perempuan terdidik di Hindia Belanda tampak sedang membangun pengalaman keibuan sebagai agensi sosial yang reflektif, bukan sekadar institusi yang dikontrol negara atau budaya.

Sebagai contoh, dalam salah satu tulisannya, Soendari menekankan keterhubungan antara gaya hidup sehat dengan struktur sosial ekonomi masyarakat. Ia menulis: “Kesehatan dan kehidupan kita bergantung pada makanan yang baik. Tetapi apakah kita bisa mendapatkan makanan yang baik tanpa para petani yang bekerja keras di ladang, tanpa para perempuan yang memanen padi, tanpa mereka yang menumbuk beras dengan penuh tenaga?” (Soendari, 1914). Di sini, kita melihat bagaimana Soendari membongkar peran ibu bukan hanya sebagai konsumen pasif, tetapi sebagai aktor yang memahami dan menghargai kerja kolektif dalam rantai produksi pangan. Perspektif ini memperluas keibuan ke dalam ranah reproduksi sosial, di mana perempuan memelihara tidak hanya keluarga, tetapi juga sistem kehidupan kolektif.

Namun, penting dicatat bahwa transformasi ini tidak sepenuhnya bebas dari batas-batas ideologis yang lebih besar. Seperti dikemukakan oleh Stoler (2002), kolonialisme tidak hanya mengatur ruang dan ekonomi, tetapi juga membentuk moralitas, afeksi, dan gender melalui *politics of intimacy*. Dalam konteks Hindia Belanda, wacana perempuan modern sebagai pengatur rumah tangga yang bersih, sehat, dan tertib merupakan bagian dari agenda kolonial dalam menciptakan keluarga bumiputera yang “beradab” namun tetap terkendali. Jadi, meskipun perempuan tampak diberdayakan, model gaya hidup modern yang dikonstruksi juga mengandung bentuk-bentuk disiplin kolonial yang lebih halus—terutama dalam hal pengaturan tubuh, konsumsi, dan hubungan domestik.

Soendari misalnya, mendorong perempuan untuk membuat pakaian sendiri sebagai bentuk penghematan dan kemandirian: “Bayangkan betapa berharganya jika seorang perempuan bisa membuat kainnya sendiri dan kain suaminya...” (Soendari, 1914). Meskipun tampak progresif, narasi ini tetap bergerak dalam kerangka moral kerja keras, efisiensi, dan pengabdian terhadap keluarga—nilai-nilai yang selaras dengan apa yang oleh Julia Suryakusuma (2011) sebut sebagai *State Ibuism*. Dalam kerangka ini, negara (kolonial dan kemudian nasional) mengatur perempuan melalui glorifikasi keibuan yang produktif namun terikat. Perempuan ideal adalah mereka yang hemat, rajin, dan tidak boros—tetapi tidak serta-merta bebas.

Lebih jauh, media perempuan seperti *Istri*, *Poetri Hindia*, atau *Soenting Melajoe* mendorong pencatatan pengeluaran, pengelolaan anggaran rumah tangga, dan regenerasi keterampilan seperti menjahit dan membuat sebagai bagian dari identitas ibu modern. Tulisan Nasimah (1913), misalnya, menekankan pentingnya perempuan mencatat pengeluaran agar dapat menghemat dan mencegah konflik rumah tangga. Gaya hidup modern, dalam konteks ini, tidak diukur dari konsumsi barang mewah atau gaya Eropa, tetapi dari kemampuan perempuan mengatur rumah tangga secara rasional, ekonomis, dan tertib.

Namun, konstruksi ini tidak bebas dari keterbatasan struktural. Sebagian besar narasi ini muncul dalam media yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi atau Belanda, dengan segmen pembaca yang relatif terbatas: perempuan terdidik dari kalangan priyayi, guru, atau pegawai. Mayoritas perempuan Bumiputera tetap tidak memiliki akses terhadap surat kabar, pendidikan formal, atau literasi tinggi. Akibatnya, narasi keibuan modern ini mencerminkan pengalaman dan aspirasi segelintir perempuan kelas menengah, bukan keseluruhan populasi perempuan. Di sinilah

muncul kemungkinan bias representasi: karena keterbatasan arsip, bahasa, dan akses, narasi dominan yang terekam dalam sejarah lebih banyak mewakili mereka yang memiliki modal pendidikan dan literasi. Sementara perempuan dari lapisan bawah—petani, buruh, pelayan rumah tangga—kemungkinan besar memiliki pandangan dan praktik keibuan yang berbeda, namun tidak terekam secara sistematis.

Batasan ini penting untuk dikemukakan agar kita tidak serta-merta menyamakan gaya hidup modern dengan universalitas pengalaman perempuan Bumiputera. Apa yang disebut sebagai “modernitas” dalam media perempuan Hindia Belanda adalah hasil konstruksi kelas menengah-terdidik yang memiliki akses terhadap bahasa dan teknologi cetak. Dengan demikian, analisis terhadap transformasi keibuan perlu mempertimbangkan bahwa modernitas bukan hanya ideologi kemajuan, tetapi juga proyek eksklusi simbolik yang beroperasi melalui bahasa, akses, dan representasi.

Meskipun demikian, narasi ini tetap penting karena menunjukkan bagaimana perempuan mulai mengklaim peran strategis dalam pengelolaan rumah tangga dan masyarakat. Keterampilan menjahit, membatik, dan bertani tidak lagi dilihat sebagai pekerjaan rendah, tetapi sebagai bentuk kontribusi ekonomi dan budaya yang berkelanjutan. Ketika industri tenun dan kerajinan mulai menurun, media perempuan aktif menyerukan regenerasi keterampilan tradisional ini agar tidak punah—sebuah upaya yang memperlihatkan bahwa modernitas tidak selalu berarti meninggalkan tradisi, tetapi juga *memodernkan praktik lama* agar tetap relevan.

Dengan demikian, keibuan dalam gaya hidup modern yang dikonstruksikan media perempuan Bumiputera merupakan artikulasi kompleks antara tradisi, efisiensi, dan moralitas publik. Figur ibu modern adalah manajer kehidupan sehari-hari yang sadar akan kesehatan, hemat dalam ekonomi, trampil secara praktis, dan bertanggung jawab secara sosial. Dalam hal ini, pengalaman keibuan menjadi salah satu saluran utama di mana perempuan terdidik memaknai modernitas secara kontekstual—bukan sebagai imitasi Barat, tetapi sebagai bentuk lokal dari kesadaran sosial dan aspirasi masa depan.

Ibu Sebagai Aktor Nasionalisme

Perkembangan media perempuan Bumiputera pada awal abad ke-20 tidak hanya merepresentasikan aspirasi pendidikan dan moral, tetapi juga menjadi medium penting dalam artikulasi kesadaran nasional. Dalam ruang ini, figur ibu tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai penjaga harmoni rumah tangga, tetapi juga sebagai subjek moral dan sosial yang memainkan peran strategis dalam pembangunan bangsa. Konsep keibuan mengalami perluasan makna, dari fungsi biologis dan pengasuhan menjadi simbol perjuangan kolektif dan agen transformasi sosial. Dalam kerangka ini, penting untuk meninjau ulang secara kritis konsep keibuan sebagai konstruksi ideologis yang berakar dalam struktur kekuasaan kolonial dan nasional.

Rich (2021) membedakan antara motherhood sebagai pengalaman dan sebagai institusi; dalam konteks kolonial Hindia, pers perempuan menghadirkan ibu bukan hanya sebagai figur pengasuh tetapi juga sebagai aktor publik yang menyuarakan kepentingan kolektif perempuan. Ini merepresentasikan pergeseran dari “*motherhood as institution*” menuju “*motherhood as experience*,” di mana keibuan tidak lagi dimonopoli oleh tatanan negara atau agama, melainkan menjadi arena artikulasi politik dan identitas.

Stoler (2010) menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya dijalankan melalui kekuasaan administratif dan ekonomi, tetapi juga melalui pengaturan relasi intim dan domestik. Gagasan tentang ibu yang ideal dalam wacana kolonial Hindia, seperti yang tercermin dalam media perempuan, merupakan bagian dari regulasi moral dan rasial yang lebih luas dalam rangka mempertahankan batas-batas antara ‘pribumi terdidik’ dan ‘pribumi liar’. Dengan demikian, keibuan dalam pers perempuan tidak dapat dipisahkan dari proyek kolonial untuk menertibkan tubuh dan hasrat perempuan bumiputera.

Sementara itu, Blackburn (2011) menekankan bahwa relasi antara negara dan perempuan di Indonesia selalu bersifat ambivalen: negara dapat menjadi instrumen emansipasi sekaligus pengekangan. Konsep keibuan dalam wacana media perempuan Bumiputera menunjukkan bagaimana perempuan menegosiasikan posisi mereka di antara dua kekuatan tersebut. Mereka tidak hanya mereproduksi ideologi gender yang dominan, tetapi juga menantanginya melalui artikulasi aspirasi pendidikan, peran publik, dan nasionalisme.

Perempuan seperti Soendari, melalui tulisan-tulisan dalam media cetak, menyatakan bahwa pendidikan perempuan memiliki konsekuensi langsung terhadap kemajuan bangsa. Ia dengan tegas menyatakan: "*Bangsa Jawa tidak dapat segera maju jika perempuan Jawa tetap dalam ketidaktahuan.*" (Soendari, 1914) Pandangan ini tidak hanya menggugat posisi subordinat perempuan dalam masyarakat, tetapi juga menantang asumsi kolonial dan adat yang menempatkan perempuan sebagai obyek pasif dalam proses perubahan sosial. Dalam kerangka ini, ibu diposisikan sebagai aktor utama dalam membentuk generasi baru yang lebih sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki kesadaran kebangsaan.

Pernyataan Soendari bahwa perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan lebih tinggi daripada laki-laki mempertegas kehadiran diskursus keibuan sebagai proyek rasional dan politis. "*Bahkan, saya berpendapat bahwa pendidikannya harus lebih jauh daripada anak laki-laki; sebab ibu adalah sosok yang seharusnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak-anaknya, sementara tugas laki-laki hanyalah memastikan kecukupan pangan dan pakaian.*" (Soendari, 1914) Dalam logika ini, ibu tidak sekadar menjalankan peran biologis atau reproduktif, melainkan menjadi pelaku aktif dalam proses pembentukan warga negara yang sehat dan cerdas. Gagasan ini selaras dengan pandangan Rich tentang *motherhood as experience*, yakni keibuan sebagai hasil refleksi, pendidikan, dan kesadaran diri, bukan sekadar peran yang ditetapkan oleh institusi patriarkal (Rich, 2021).

Lebih jauh, Blackburn mencatat bahwa pendidikan adalah salah satu medan utama negosiasi antara negara dan perempuan, di mana perempuan tidak hanya menuntut hak individual, tetapi juga memperluas mandat mereka sebagai aktor pembangunan bangsa. Dalam hal ini, keibuan dipolitisasi—dimaknai ulang sebagai ranah kepemimpinan moral dan sosial, sejalan dengan tuntutan modernitas (Blackburn, 2004).

Di sisi lain, reinterpretasi peran domestik ini juga bisa dibaca melalui konsep "ibuisme negara" dari Suryakusuma, yakni konstruksi ideologis di mana perempuan diangkat sebagai simbol harmoni, keteraturan, dan moralitas publik. Namun, berbeda dengan model pasif dan normatif ibuisme Orde Baru, Soendari dan para penulis perempuan sezamannya justru menggunakan wacana keibuan sebagai cara untuk merebut ruang otoritas, menjadikan rumah tangga sebagai titik tolak perubahan sosial dan nasional (Suryakusuma, 2011).

Kesadaran bahwa ibu adalah figur strategis dalam pembentukan bangsa juga muncul dalam tulisan Roehana Koeddoes. Dalam refleksinya, ia menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan akan membawa konsekuensi sosial jangka panjang, terutama dalam konteks pernikahan dan keberlanjutan komunitas. Ia menulis: "*Supaja kelak terdapat pertimbangan yang sehat, baik pemuda maupun pemudi, kita harus diberikan kesempatan yang sama dalam meluaskan dunia pengetahuannya, demi kebahagiaan semua, terutama sekali kebahagiaan anak tjuju kita dikemudian hari*" (Harian Pantjasila, 1966). Dalam narasi ini, Roehana menunjukkan bahwa keadilan gender dalam pendidikan tidak hanya penting untuk keseimbangan relasi laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih rasional dan beradab.

Keibuan dalam pemikiran Roehana dan Soendari bukan hanya urusan rumah tangga, tetapi merupakan posisi sosial yang mengandung muatan politik. Melalui keibuan, perempuan tidak hanya menciptakan kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis, tetapi juga menjadi pemangku tanggung jawab masa depan komunitas Bumiputera. Ibu dihadirkan sebagai penjaga integritas moral bangsa, yang mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran, ketekunan, dan rasa tanggung jawab sejak dini dalam keluarga. Pandangan ini menjadi lebih relevan ketika dikaitkan dengan konteks kolonialisme,

di mana sistem pendidikan dan struktur kekuasaan secara umum masih meminggirkan perempuan Bumiputera. Dalam situasi ini, peran ibu menjadi satu-satunya saluran pendidikan informal yang memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran sosial dan nasional. Dalam tulisannya, Soendari (1914) juga mengkritik struktur pendidikan kolonial yang tidak sensitif terhadap kebutuhan dan kodrat sosial perempuan Bumiputera. Ia menekankan bahwa perempuan membutuhkan sekolah khusus yang dikelola oleh dan untuk perempuan: *"Karena orang Jawa tidak mudah mengirimkan anak perempuannya ke sekolah campuran, pemerintah harus mendirikan sekolah khusus untuk anak perempuan Bumiputera. Hal ini juga mencakup pendirian sekolah pelatihan bagi guru perempuan Bumiputera, yang idealnya dipimpin oleh perempuan dan diajarkan sepenuhnya oleh tenaga pengajar perempuan."* Gagasan ini memperlihatkan adanya tuntutan akan ruang pendidikan yang aman, kontekstual, dan mampu memberdayakan perempuan untuk menjalankan peran keibuannya secara lebih mandiri dan terhormat.

Lebih dari sekadar ide, konstruksi keibuan yang demikian mulai terwujud dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Dalam pidato yang disampaikan oleh Ny. Datoe Toemenggoeng (De Locomotief, 1913) di hadapan Perkumpulan Hak-Hak Perempuan tahun 1913, terlihat bagaimana perempuan mulai memproyeksikan figur ibu sebagai pelaku sejarah dan agen sosial. Ia mengingatkan bahwa perempuan Indonesia sejak masa silam telah memiliki kemampuan memimpin dan mengambil keputusan, dengan merujuk pada tokoh seperti Ratu Patni dari Majapahit. Kehadiran perempuan dalam forum intelektual ini menandai pergeseran besar dalam posisi sosial perempuan Bumiputera. Mereka bukan lagi sekadar objek peraturan kolonial atau adat, tetapi juga subjek yang menyusun wacana dan menyuarakan aspirasi sosial-politik mereka. Dengan demikian, media perempuan Bumiputera tidak hanya mencerminkan aspirasi sosial individu, tetapi juga menjadi arena kolektif dalam menyusun ulang definisi keibuan sebagai identitas moral dan sosial yang strategis. Figur ibu menjadi jembatan antara ruang privat dan publik, antara nilai tradisional dan modernitas, serta antara tugas domestik dan tanggung jawab kebangsaan. Redefinisi ini menjadi landasan penting bagi artikulasi emansipasi perempuan yang berakar kuat pada pengalaman dan nilai-nilai lokal, namun terbuka terhadap arah perubahan zaman.

PENUTUP

Redefinisi keibuan yang muncul dalam pers perempuan Bumiputera awal abad ke-20 mencerminkan dinamika penting dalam sejarah kesadaran perempuan di Hindia Belanda. Namun, perlu diakui bahwa artikulasi gagasan-gagasan progresif mengenai keibuan, pendidikan, dan peran sosial perempuan pada masa itu sebagian besar lahir dari kalangan elite terdidik. Sosok-sosok seperti Soendari dan Roehana Koeddoes menulis dari posisi yang relatif istimewa—memiliki akses terhadap pendidikan, media cetak, dan jaringan sosial modern. Dengan demikian, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana redefinisi keibuan ini merepresentasikan pengalaman kolektif perempuan Bumiputera secara keseluruhan?

Meskipun pada awalnya eksklusif dan terpusat di kalangan priyayi atau elite urban, gagasan-gagasan tersebut tidak berhenti pada lapisan atas masyarakat. Melalui media perempuan, sekolah-sekolah perempuan, dan organisasi-organisasi sosial yang berkembang di berbagai kota, wacana ini perlahan-lahan menyebar dan menembus batas kelas. Bahkan, dalam keterbatasannya, wacana ini mulai mempengaruhi cara masyarakat lebih luas memahami peran perempuan dan keibuan dalam kerangka kebangsaan. Dengan kata lain, meski bersifat elitis pada mulanya, redefinisi ini memiliki daya transformasi historis yang signifikan.

Lebih dari sekadar perubahan narasi tentang perempuan, apa yang terjadi pada awal abad ke-20 merupakan upaya awal untuk mengklaim ruang agensi bagi perempuan sebagai aktor sosial. Penolakan terhadap keibuan yang semata-mata dipahami sebagai tugas domestik membuka jalan bagi perempuan untuk merebut identitas yang lebih kompleks—sebagai pendidik, manajer rumah tangga modern, pemelihara nilai-nilai kolektif, dan partisipan aktif dalam proyek kebangsaan. Dalam kondisi kolonial, ketika akses terhadap pendidikan dan ruang publik sangat terbatas bagi perempuan,

wacana keibuan yang dimaknai ulang ini menjadi strategi penting untuk membingkai keterlibatan perempuan secara sah dan terhormat dalam masyarakat.

Transformasi makna keibuan ini bukan hanya gejala sosial, tetapi juga strategi politik—cara perempuan untuk memasuki ruang publik melalui posisi yang secara budaya diterima, sambil sekaligus menegosiasikan batas-batasnya. Inilah yang kemudian menjadi landasan penting bagi munculnya gerakan perempuan Indonesia pada dekade-dekade berikutnya, yang tidak hanya memperjuangkan hak-hak formal, tetapi juga membentuk ulang persepsi kolektif tentang perempuan sebagai subjek historis. Dengan kata lain, redefinisi keibuan adalah pintu masuk menuju emansipasi yang khas: tidak serta-merta menolak tradisi, tetapi mengolahnya menjadi sarana perjuangan yang kontekstual dan visioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, B. W. (2006). *The flaming womb: Repositioning women in early modern Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Bataviasch Nieuwsblad. (1914, 8 Januari). Wiroloekito, K. *Inlandsche Vrouwenorganisatie*.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Blackburn, S. (2008). Kartini and the Politics of Women's Emancipation in Indonesia. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 18(3), 377–390.
- De Locomotief. (1918, 4 Juli). *Tiende Bondsvergadering van Boedi Oetomo*. *De Locomotief: Samarangsch Handels- en Advertentie-Blad*.
- De Locomotief. (1931, 14 November). *De Inheemsche Vrouw De Positie der Vrouw in de Inlandsche Samenleving: Lezing van Mevr. Datoe Toemenggoeng te Batavia*.
- Harian Pantjasila. (1966, Mei). *Omong-omong dengan Wartawan Kawakan Nj. Roehana Khoedoes*.
- Het Katholieke Schoolblad. (1912, 25 Januari). *Van het Binnenhof*. XXII. *DE BEGROOTINGSDEBATTEN EN HET ONDERWIJS*. *Het Katholieke Schoolblad*, VIII.
- Het Koloniaal Weekblad. (1914, 21 Mei). *Verschil van opvatting*.
- Het Koloniaal Weekblad. (1914, 9 Juli). *Wat de Inlander Zegt: Genezing*.
- Latifa, I., & Pribadi, F. (2022). Stereotip gender dalam film *Chaos Walking*. *Kronik: Journal of History Education and Historiography*, 6(1).
- Locher-Scholten, E. (2000). *Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900–1942*. Amsterdam University Press.
- Rich, A. (2021). *Of woman born: Motherhood as experience and institution* (Edisi ke-10). W. W. Norton & Company.
- Ruddick, S. (1990). *Maternal thinking: Toward a politics of peace*. Ballantine Books.
- Soenting Melajoe. (1913, 27 Juni). *Nasimah*. *Soenting Melajoe*, No. 27.
- Soenting Melajoe. (1919, 5 Desember). Karim, A. *Bagaimanakah Anak2 Boemi Poetri Haroes Dididik*. *Soenting Melajoe*, No. 48.
- Stoler, A. L. (2002). *Carnal knowledge and imperial power: Race and the intimate in colonial rule*. University of California Press.
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme negara: Konstruksi sosial keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu.
- Swantoro, P. (2016). *Dari buku ke buku sambung menyambung menjadi satu*. Kompas Gramedia.
- Siti Soendari. (tanpa tahun). *Verheffing van de Inlandsche Vrouw*. Dalam *Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madura* (Bagian VII).
- Tweede Kamer der Staten-Generaal. (1902). *Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1901–1902*. 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
- Tweede Kamer der Staten-Generaal. (1903). *Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1902–1903*. 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
- Tweede Kamer der Staten-Generaal. (1906). *Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1905–1906*. 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.

- Tweede Kamer der Staten-Generaal. (1909). *Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1910–1911*. 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
- Tweede Kamer der Staten-Generaal. (1915). *Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1914–1915*. 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
- Valentina, T. R. (2018). *Dinamika politik lokal di Minangkabau: Nagari dalam negara dan model demokrasinya*. Rajawali Pers.
- Van Deventer, C. Th. (1899). *Een eereschuld. De Gids*, 63(1).
- Wieringa, S. E. (1995). The Politicization of Gender Relations in Indonesia: The Indonesian Women's Movement and the State. *Asian Journal of Women's Studies*, 1(2), 23–56.
- Yuliandre, D. (2013). *Sejarah perkembangan pers Minangkabau (1859–1945)*. Gramedia Pustaka Utama.